

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2022

KEDEPUTIAN BIDANG
STATISTIK SOSIAL



STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT
STATISTIK KETAHANAN SOSIAL

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2022

KEDEPUTIAN BIDANG
STATISTIK SOSIAL



STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT
STATISTIK KETAHANAN SOSIAL

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP adalah gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan instansi tersebut yang dibiayai oleh APBN/APBD. Penyusunan LAKIP didasarkan pada Siklus Anggaran satu tahun.

LAKIP Deputy Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik merupakan perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Deputy Bidang Statistik Sosial secara periodik. Penyusunan laporan dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Deputy Bidang Statistik Sosial dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja yang mencerminkan *outcome* atau prestasi kerja ke deputian. Rata-rata capaian kinerja indikator kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial tahun 2022 sebesar 106,48 persen. Penghitungan didasarkan pada skala penilaian yang digunakan sebagai acuan, dapat dikatakan kategori capaian kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial tahun 2022 berstatus sangat berhasil.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan, sampai terbitnya laporan ini. Semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami terima untuk penyempurnaan laporan dimasa mendatang.

Jakarta, 31 Januari 2023

Deputy Bidang Statistik Sosial



Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si

NIP. 19690109 199211 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kedeputian Bidang Statistik Sosial	2
1.4. Sumber Daya Manusia	3
1.6. Peran Deputi Bidang Statistik Sosial dalam Reformasi Birokrasi.....	8
1.7. Potensi dan Permasalahan.....	10
1.8. Sistematika Penyajian Laporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial	15
2.2. Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Statistik Sosial 2020 - 2024	17
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Statistik Sosial 2022	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	24
3.2. Perkembangan Capaian Kinerja	50
3.3. Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2020-2024	51
3.4. Prestasi Tahun 2022	53
3.5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2022.....	56
3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	58
BAB IV PENUTUP.....	63
4.1. Kesimpulan Akuntabilitas Kinerja	63
4.2. Rencana Tindak Lanjut	64
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Jumlah dan Kebutuhan Pegawai pada Deputi Bidang Statistik Sosial Menurut Jenis Jabatan, 2022	4
Tabel 2. 1. Pernyataan Visi dan Misi Kedeputian Bidang Statistik Sosial.....	16
Tabel 2. 2. Rumusan Visi, Misi dan Tujuan Kedeputian Bidang Statistik Sosial	16
Tabel 2. 3. Tujuan dan Sasaran Strategis di Kedeputian Bidang Statistik Sosial	17
Tabel 2. 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Deputi Bidang Statistik Sosial.....	20
Tabel 3.1. Skala Kategori Penilaian	24
Tabel 3. 2. Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2022 (persen)	25
Tabel 3. 3. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2022	26
Tabel 3. 4. Persentase Publikasi Statistik Sosial yang Menyertakan Informasi Akurasi Data, Tahun 2022.....	27
Tabel 3. 5. Persentase Publikasi Statistik Sosial yang Menyertakan Informasi Akurasi Data Berdasarkan Direktorat, Tahun 2022.....	28
Tabel 3. 6. Daftar Publikasi dengan Menyertakan Nilai Akurasi Data yang Diterbitkan Kedeputian Bidang Statistik Sosial, Tahun 2022	28
Tabel 3. 7. Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan dalam Dokumen RPJMN, Tahun 2022	33
Tabel 3. 8. Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN, Berdasarkan Direktorat, Tahun 2022	33
Tabel 3. 9. Daftar Indikator Statistik Sosial yang Digunakan dalam Dokumen RPJMN Kedeputian Bidang Statistik Sosial, Tahun 2022	34
Tabel 3. 10. Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan sebagai indikator SDGs, Tahun 2022.....	38
Tabel 3. 11. Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan sebagai indikator SDGs Berdasarkan Direktorat, Tahun 2022	38
Tabel 3. 12. Daftar Indikator Statistik Sosial yang Digunakan sebagai indikator SDGs yang Dihasilkan Kedeputian Bidang Statistik Sosial, Tahun 2022.....	39
Tabel 3. 13. Target dan Realisasi K/L/D/I yang Mendapat Pembinaan Statistik dari Kedeputian Bidang Statistik Sosial	43
Tabel 3. 14. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 2.2.1)	45
Tabel 3. 15. Target dan Realisasi Jumlah Aktivitas Pembinaan Statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I, Tahun 2022	46
Tabel 3. 16. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 2.2.2)	48
Tabel 3. 17. Perkembangan Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial Tahun 2021-2022	50
Tabel 3. 18. Capaian Kinerja Tahun 2021-2022 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2020-2024	52
Tabel 3. 19. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial.....	56

Tabel 3. 20. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial Berdasarkan Sasaran dan Program Periode 2022.....	56
Tabel 3. 21. Efisiensi Anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Jumlah Sumber Daya Manusia pada Deputi Bidang Statistik Sosial Menurut Pendidikan, 2022	3
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi Kedeputian Bidang Statistik Sosial BPS.....	67
Lampiran 2. Rencana Strategis Kedeputian Bidang Statistik Sosial BPS Tahun 2020-2024 (Reviu).....	68
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Tahun 2022 (Reviu).....	69
Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial Tahun 2022	72

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Deputy Bidang Statistik Sosial disusun sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. LAKIP juga merupakan perwujudan visi dan misi, yang pelaksanaannya telah diupayakan sebagaimana tertuang dalam Renstra Deputy Bidang Statistik Sosial 2020 – 2024 dan juga pada perjanjian kinerja tahun 2022.

Deputy Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas menyediakan data dan informasi dibidang statistik sosial yang meliputi Statistik Kesejahteraan Rakyat, Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan serta Statistik Ketahanan Sosial. Dalam memenuhi tugas pokok tersebut, Deputy Bidang Statistik Sosial melakukan pengumpulan data berupa sensus dan survei.

Hasil pendataan sensus dan survei telah disajikan dalam bentuk publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, dan Statistik Ketahanan Sosial yang menyertakan akurasi, dan melalui penyajian indikator statistik sosial untuk kepentingan RPJMN dan SDGs. Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan prima dalam membina statistik sektoral, Deputy Bidang Statistik Sosial telah mewujudkan melalui penguatan statistik sektoral di K/L/D/I

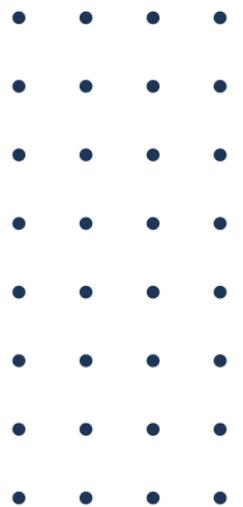
Evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas Deputy Bidang Statistik Sosial memperlihatkan capaian kinerja yang baik. Pada tahun 2022, Rata-rata rata-rata capaian kinerja indikator kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial tahun 2022 sebesar 106,48 persen. Penghitungan didasarkan pada skala penilaian yang digunakan sebagai acuan, dapat dikatakan kategori capaian kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial tahun 2022 berstatus sangat berhasil.

Pagu Anggaran Deputy Bidang Statistik Sosial tahun 2022 adalah sebesar Rp. 74.519.215.506,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.071.157.007,- atau sebesar 89,62 persen. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja baik kinerja tujuan maupun kinerja sasaran strategis dapat dikatakan Deputy Bidang Statistik Sosial telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran.



01

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kewajiban menyusun laporan kinerja merupakan amanat yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja tahunan merupakan ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Statistik Sosial atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputy Bidang Statistik Sosial Tahun 2022 merupakan laporan yang berisi target, sasaran, dan realisasi terhadap tugas dan tanggung jawab Deputy Bidang Statistik Sosial periode tahun 2022. Selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Deputy Bidang Statistik Sosial ini.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan laporan kinerja setiap tahun.

1.2.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Deputi Bidang Statistik Sosial selama tahun 2022. Penyusunan laporan kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Statistik Sosial dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kedeputian Bidang Statistik Sosial

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, statistik kesejahteraan rakyat, dan statistik ketahanan sosial. Dalam menjalankan tugas, Deputi Bidang Statistik Sosial menyelenggarakan berbagai fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial;
2. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial;
3. Pelaksanaan pengembangan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial; dan
4. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

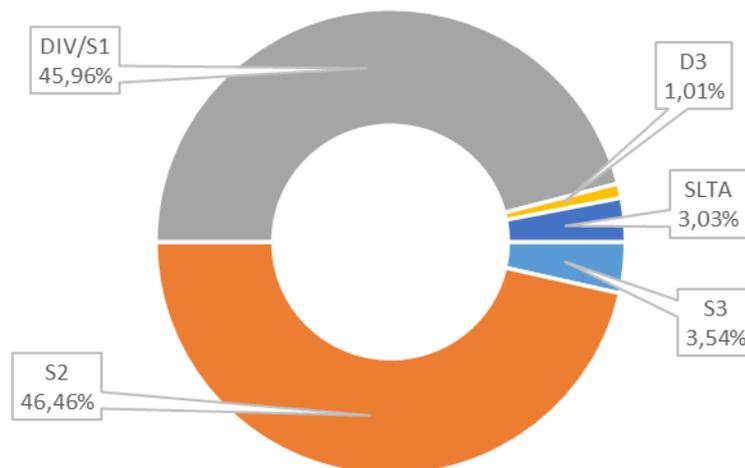
Susunan Organisasi Deputi Bidang Statistik Sosial terdiri atas Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, dimana masing-masing direktorat tersebut terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

1.4. Sumber Daya Manusia

1.4.1. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Deputi Bidang Statistik Sosial sehari-harinya didukung oleh 196 orang pegawai yang terdiri atas 6 orang (3,06 persen) berpendidikan S3; 94 orang (46,94 persen) berpendidikan S2; 90 orang (45,92 persen) berpendidikan S1/DIV; 2 orang (1,02 persen) berpendidikan DIII; dan 6 orang (3,06 persen) berpendidikan SLTA.

Gambar 1. memperlihatkan kualitas SDM Deputi Bidang Statistik Sosial tahun 2022 tersebut cukup baik dan sudah sangat mendukung dalam menyelesaikan tupoksi Deputi Bidang Statistik Sosial dan secara teknis mampu menerapkan ilmu statistik dan menguasai teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan serta dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan.



Gambar 1. 1. Jumlah Sumber Daya Manusia pada Deputi Bidang Statistik Sosial Menurut Pendidikan, 2022

1.4.2. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Jabatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 7, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikelompokkan menurut kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang terdiri dari: Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Fungsional (JF); dan Jabatan Administrasi (JA). Di lingkungan Deputi Bidang Statistik Sosial terdapat 3 orang

pimpinan tinggi Pratama yang membawahi 163 orang pejabat fungsional dan 21 orang staf.

Tabel 1. 1. Jumlah dan Kebutuhan Pegawai pada Deputy Bidang Statistik Sosial Menurut Jenis Jabatan, 2022

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai	Kondisi Tahun 2022	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Deputi Bidang Statistik Sosial	1	1	100,00
2	Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1	1	100,00
3	Statistisi Ahli Utama	1	0	0,00
4	Statistisi Ahli Madya	12	7	58,33
5	Statistisi Ahli Muda	37	26	70,27
6	Statistisi Ahli Pertama	36	23	63,89
7	Arsiparis Muda	1	0	0,00
8	Arsiparis Pertama	1	0	0,00
9	Pengolah Data	9	0	0,00
10	Sekretaris	1	1	100,00
11	Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat	1	1	100,00
12	Statistisi Ahli Utama	1	1	100,00
13	Statistisi Ahli Madya	15	6	40,00
14	Statistisi Ahli Muda	23	21	91,30
15	Statistisi Ahli Pertama	25	18	72,00
16	Statistisi Mahir	1	1	100,00
17	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0,00
18	Arsiparis Terampil	1	0	0,00
19	Pengolah Data	2	0	0,00
20	Sekretaris	1	0	0,00
21	Direktur Statistik Ketahanan Sosial	1	1	100,00
22	Statistisi Ahli Utama	1	0	0,00
23	Statistisi Ahli Madya	13	9	69,23
24	Statistisi Ahli Muda	25	21	84,00
25	Statistisi Ahli Pertama	30	30	100,00
26	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0,00
27	Arsiparis Terampil	1	0	0,00
28	Pengolah Data	5	0	0,00
29	Sekretaris	1	1	100,00
JUMLAH		249	169	67,87

Ditinjau dari jabatan fungsional, seluruh pejabat fungsional di Deputy Bidang Statistik Sosial merupakan fungsional statistisi yang terdiri dari 1 orang Statistisi Ahli

Utama, 22 orang Statistisi Ahli Madya, 68 orang Statistisi Ahli Muda, 71 orang Statistisi Ahli Pertama, dan 1 orang Statistisi Mahir. Komposisi tersebut belum memenuhi seluruh kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Deputi Bidang Statistik Sosial sesuai Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 281 Tahun 2021 tentang Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja (ABK) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021, sebagaimana tersaji pada Tabel 1.1.

1.4.3. Pagu Anggaran Tahun 2022

Dari sisi anggaran, guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2022, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp74.519.215.506,- yang dituangkan ke dalam 3 (tiga) program dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp40.766.696.506,-
2. Program Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Rp2.846.200.000,-
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial sebesar Rp30.906.319.000,

1.5. Peran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020 – 2024, Deputi Bidang Statistik Sosial mendukung arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020 – 2024 menjadikan Deputi Statistik Sosial memiliki peran strategis pada berbagai hal berikut, antara lain:

1. Data Perencanaan Pembangunan
Kedeputian Bidang Statistik Sosial telah menghasilkan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan, diantaranya data-data strategis dan tujuan pembangunan.
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Kedeputian Bidang Statistik Sosial berkomitmen dalam pelaksanaan target TPB dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap

indikator statistik sosial. Selain sebagai penyedia data, Deputi Bidang Statistik Sosial berperan dalam mengawal K/L lain dalam penyediaan indikator TPB.

3. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan statistik sosial. Strategi yang dilakukan Deputi Bidang Statistik Sosial antara lain:

- a. Menghasilkan ukuran statistik menurut jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan;
- b. Memasukkan perspektif gender dalam survei yang dilakukan;
- c. Memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik;
- d. Memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke kuliah/sekolah, kursus, dan pelatihan.

4. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Salah satu survei di Bidang Statistik Sosial terkait modal sosial budaya yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSPB) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Pengumpulan data terkait kebudayaan merujuk pada *Framework for Cultural Statistics* (FCS) yang sudah dikembangkan oleh Unesco pada tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

5. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Aspek pemanfaatan teknologi komputasi dilakukan dalam kegiatan statistik seperti *big data* dan *mobile computing*.

6. Statistik Kebahagiaan

Selain menghasilkan indikator statistik obyektif, Kedeputan bidang Statistik Sosial juga menghasilkan statistik subyektif yang menjadi pelengkap dari statistik lainnya yaitu statistik kebahagiaan. Survei terkait statistik kebahagiaan yaitu Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) yang sudah dilaksanakan dua kali yaitu tahun 2014 dan 2017. Survei ini akan dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

Selain beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Sosial juga memiliki peran strategis dalam mendukung 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional yang merupakan Prioritas Nasional (PN) periode tahun 2020–2024, diantaranya:

1. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020)

Pelaksanaan SP2020 mendukung PN 1 yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. PN yang berkaitan dengan Deputi Bidang Statistik Sosial adalah Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan.

2. Pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Pelaksanaan Sakernas mendukung PN 3 yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.

3. Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pelaksanaan Susenas mendukung PN 1 yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, PN 3 yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing serta PN 4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

4. Pelaksanaan Pendataan Potensi Desa (Podes)

Pelaksanaan Pendataan Podes mendukung PN 2 yaitu infrastruktur dan pemerataan wilayah.

5. Penyusunan Statistik Keamanan

Pelaksanaan penyusunan statistik keamanan mendukung PN 7 yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

6. Pelaksanaan Survei Prilaku Anti Korupsi (SPAK)

Pelaksanaan SPAK mendukung PN 7 yaitu memperkuat stabilitas pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

7. Pelaksanaan Survei Demokrasi Indonesia

Pelaksanaan Survei Demokrasi Indonesia mendukung PN 7 yaitu memperkuat stabilitas pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

1.6. Peran Deputi Bidang Statistik Sosial dalam Reformasi Birokrasi

Deputi Bidang Statistik Sosial turut berperan aktif dalam reformasi birokrasi (RB) pada 8 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi Deputi Statistik Sosial pada 8 area perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Reviu atas *Roadmap* RB

Penyusunan *roadmap* RB BPS tahun 2020-2024 mengacu pada *roadmap* RB Nasional. Selain itu, hasil reviu terhadap *roadmap* tahun sebelumnya juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun *roadmap* RB BPS. Hal ini dilakukan untuk memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan serta ukuran keberhasilan dan target yang akan dicapai.

2. Penguatan dan Penajaman Program Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai keberhasilan Reformasi Birokrasi BPS, khususnya di Kedeputian Bidang Statistik Sosial (KBSS), setiap tahun disusun rencana aksi RB KBSS. Rencana aksi ini disusun di setiap unit kerja dan selanjutnya disatukan menjadi rencana aksi KBSS. Rencana aksi ini kemudian dibuat lebih detail dengan merinci kegiatan apa saja yang akan dilakukan beserta tim kerja pelaksana kegiatan. Hal ini dilakukan supaya sasaran kerja yang ditetapkan dapat tercapai.

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara Berkala

Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Lingkungan KBSS secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kegiatan rapat juga melalui aplikasi monitoring yang disusun, seperti SIMONEV.

4. Meningkatkan peran Agen Perubahan di Setiap Unit Kerja

Agen Perubahan atau *Change Agent Network* (CAN) bertugas mempromosikan perubahan di lingkungan unit kerjanya. Selain itu, CAN mendorong perubahan sesuai kebutuhan di unit kerja dan membangun kontrol sosial diantara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas. Perubahan yang dilakukan oleh agen perubahan tertuang dalam beberapa program aksi di unit kerja sebagai berikut:

- a. Internalisasi nilai-nilai BERAKHLAK
- b. Sosialisasi Program RB di unit kerja
- c. Perubahan Tatahan Ruang Kerja untuk Meningkatkan Produktivitas
- d. Menginisiasi Pegawai untuk Berbagi Pengetahuan
- e. Memperkuat Pengendalian Internal

Pengendalian internal dilakukan untuk memastikan setiap unit kerja mampu mencapai kinerja yang telah ditetapkan serta mampu mengantisipasi risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja.

5. Meningkatkan Kapasitas Tim Asesor

Peningkatan kapasitas tim asesor dilakukan agar mampu melakukan evaluasi hasil perubahan yang dicapai di unit kerja selain melakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan. Tim asesor sebagai tim yang melakukan evaluasi perubahan yang dicapai di DBSS telah melakukan tugasnya yaitu melakukan penilaian PMPRB DBSS secara objektif agar dapat memperbaiki temuan dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta identifikasi permasalahan yang dapat meningkatkan kinerja RB dilingkungan DBSS.

6. Meningkatkan Komunikasi dengan *Stakeholder*

Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dilakukan untuk melakukan koordinasi dan pemberian informasi segala perbaikan dan inovasi yang dilakukan oleh BPS dengan tujuan agar *stakeholder* mengetahui hasil perbaikan dan inovasi yang telah dilakukan.

7. Mendorong Penciptaan Inovasi

Salah satu komponen dalam RB adalah *reform*, yaitu memberikan dorongan untuk menciptakan inovasi pada setiap unit kerja agar dapat melakukan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik.

1.7. Potensi dan Permasalahan

Deputi Bidang Statistik Sosial memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Dalam menjalankan tugasnya, berbagai kegiatan prioritas diselenggarakan Deputi Bidang Statistik Sosial guna menghasilkan berbagai data statistik sosial yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial mampu menghasilkan berbagai ukuran maupun indikator Statistik Sosial yang berkualitas, lengkap, mutakhir, dan terpercaya. Kelengkapan beragam data statistik sosial selama ini telah mampu memberikan andil penting dalam bidang perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional. Selanjutnya, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, Deputi Bidang Statistik Sosial juga memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam pengumpulan data. Dengan demikian data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*).

Berbagai tantangan yang muncul pada berbagai tahap kegiatan statistik sosial yang dilaksanakan harus dapat diatasi guna mewujudkan data berkualitas. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data bidang statistik sosial yang dihasilkan sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan akomodasi terhadap indikator sektoral mungkin berakibat pada beban muatan variabel suatu survei, untuk itu perlu ditingkatkan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Tantangan lainnya adalah mulai meningkatnya keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Statistik Sosial. Hal ini dapat menjadi kendala untuk memperoleh data yang berkualitas. Oleh karena itu diperlukan kegiatan sosialisasi, koordinasi yang terus menerus terhadap responden sehingga dapat menghasilkan hubungan yang baik dengan sumber data yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas data tersebut.

Kondisi pandemi yang masih berdampak pada tahun 2022 turut berpengaruh besar pada berbagai kegiatan di Deputi Bidang Statistik Sosial, salah satunya keterbatasan anggaran yang berdampak terhadap proses bisnis statistik seperti proses persiapan, pelatihan dan pelaksanaan lapangan berbagai survei di Kedeputian

Bidang Statistik Sosial. Keterbatasan yang muncul akibat dari pandemi telah memacu terciptanya inovasi dalam proses bisnis pelaksanaan statistik di Kedeputian Bidang Statistik Sosial. Di lain sisi, jumlah SDM yang diharapkan mampu memenuhi jabatan fungsional tertentu masih terbatas, sehingga diharapkan setiap pegawai mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensinya guna memenuhi kebutuhan tersebut.

1.8. Sistematika Penyajian Laporan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah mencantumkan mengenai sistematika penyajian laporan. Merujuk pada petunjuk teknis tersebut, Laporan Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial Tahun 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauh mana Deputy Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik mencapai tujuan dan sasaran utama serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Dijelaskan juga langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan latar belakang; dasar hukum; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Deputy Bidang Statistik Sosial; sumber daya manusia dan dukungan anggaran; peran strategis Deputy Bidang Statistik Sosial; pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Statistik Sosial; potensi dan permasalahan serta sistematika penyajian laporan.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Pada bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Statistik Sosial 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Statistik Sosial 2022. Pada bab ini akan disampaikan visi dan misi, kebijakan dan program indikator serta

cara mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi langkah-langkah antisipasi yang akan diambil. Disajikan pula alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Selain itu diuraikan pula Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial 2022, Perkembangan Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial, Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial terhadap Target Renstra 2020-2024 dan Realisasi Anggaran tahun 2022.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial BPS serta strategi pemecahan masalah serta langkah yang akan dilakukan Deputi Bidang Statistik Sosial untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



02

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial

Visi Kedeputian Bidang Statistik Sosial dibangun untuk mendukung visi BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024 sebagai “Penyedia Data Statistik Sosial Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Pembangunan nasional di bidang statistik sosial diarahkan agar mampu mengakomodasi tantangan yang berkembang, seperti dukungan dan kerja nyata demi terwujudnya satu data kependudukan di Indonesia, reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, tuntutan tersedianya data dan informasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi statistik, serta penyelenggaraan kegiatan statistik dengan kondisi mobilisasi penduduk yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka dirumuskan visi Kedeputian Bidang Statistik Sosial adalah “Penyedia Data Statistik Sosial Berkualitas untuk Indonesia Maju”.

Untuk mencapai visi Kedeputian Bidang Statistik Sosial, maka ditetapkan misi yang menggambarkan kegiatan perstatistikan yang harus diwujudkan dengan sungguh- sungguh. Misi Kedeputian Bidang Statistik Sosial dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan Kedeputian Bidang Statistik Sosial yang diselaraskan dengan Misi Badan Pusat Statistik. Rincian Misi Kedeputian Bidang Statistik Sosial adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data statistik sosial berkualitas yang berstandar nasional dan internasional; dan
2. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.

Tabel 2. 1. Pernyataan Visi dan Misi Kedeputan Bidang Statistik Sosial

Visi Kedeputan Bidang Statistik	Penyedia Data Statistik Sosial Berkualitas untuk Indonesia Maju	Misi Kedeputan Bidang Statistik Sosial
		<p>Misi 1: Menyediakan data statistik sosial berkualitas yang berstandar nasional dan internasional</p> <p>Misi 2: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional</p>

Tujuan yang ditetapkan oleh Kedeputan Bidang Statistik Sosial mendukung berbagai peran dan tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang terhadap Badan Pusat Statistik. Tujuan Kedeputan Bidang Statistik Sosial juga mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kedeputan Bidang Statistik Sosial 2020-2024. Tujuan Kedeputan Bidang Statistik Sosial Sosial dalam rangka mencapai visi dan mewujudkan misi Kedeputan Bidang Statistik Sosial Sosial 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Rumusan Visi, Misi dan Tujuan Kedeputan Bidang Statistik Sosial

Visi Kedeputan Bidang Statistik Sosial	Penyedia Data Statistik Sosial Berkualitas untuk Indonesia Maju	Misi Kedeputan Bidang Statistik Sosial
		<p>Misi 1: Menyediakan data statistik sosial berkualitas yang berstandar nasional dan internasional</p> <p>Misi 2: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional</p>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 	
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 	

Tujuan 1: Menyediakan data Statistik Sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:

Misi ke-1: Menyediakan Data Statistik Sosial berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Tujuan 2: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:

Misi ke-2: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.

Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi Kedepuyan Bidang Statistik Sosial. Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kedepuyan Bidang Statistik Sosial yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan pada Kedepuyan Bidang Statistik Sosial ini. Adapun tujuan, sasaran strategis, dirumuskan dalam Tabel 2.3. berikut:

Tabel 2. 3. Tujuan dan Sasaran Strategis di Kedepuyan Bidang Statistik Sosial

Tujuan (1)	Sasaran Strategis (2)
Menyediakan data Statistik Sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Meningkatnya pemanfaatan data statistik sosial yang berkualitas
Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya pemanfaatan data statistik sosial yang berkualitas. Sasaran strategis ini mendukung pencapaian tujuan pertama, yaitu menyediakan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.

Sasaran Strategis 2: Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I. Sasaran strategis ini mendukung pencapaian tujuan yang ketiga, yaitu meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN.

2.2. Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Statistik Sosial 2020-2024

Arah dan kebijakan strategi Kedepuyan Bidang Statistik Sosial dalam penyediaan data dan informasi statistik merupakan turunan dari arah dan kebijakan strategi BPS yang termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020, Tentang Rencana Stategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020–2024.

2.2.1. Arah kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan Strategi Kedeputan Bidang Statistik Sosial berfokus pada 2 (dua) dari 3 (tiga) arah dan kebijakan strategi yang dicanangkan oleh BPS yaitu:

1. Menyediakan data Statistik Sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik sosial yang berkualitas.

Arah kebijakan yang ingin diraih yaitu:

- a. Peningkatan kualitas data statistik sosial;
- b. Penilaian penjaminan kualitas statistik dasar; dan
- c. Penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar.

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat mendukung tercapainya arah dan kebijakan ini antara lain:

- a. Meningkatkan akurasi data statistik sosial;
 - b. Memastikan kemutakhiran data melalui pemanfaatan teknologi informasi;
 - c. Melakukan koordinasi untuk dapat meningkatkan kualitas metodologi survey dan sensus;
 - d. Mengembangkan penerapan *Small Area Estimation* (SAE) dalam penyediaan data statistik sosial;
 - e. Menerapkan Big Data dalam penyediaan data statistik sosial;
 - f. Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral melalui *National Quality Assurance Framework* (NQAF);
 - g. Memastikan penggunaan standar dan metodologi data statistik sosial di Indonesia;
 - h. Adaptasi terhadap perubahan metodologi di tingkat internasional; dan
 - i. Menugaskan statistisi dalam pelaksanaan kegiatan survei/sensus.
2. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN yaitu penguatan statistik sektoral di K/L/D/I.

Arah kebijakan yang ingin diraih yaitu:

- a. Penguatan implementasi SSN; dan
- b. Penyediaan statistik sektoral

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat mendukung tercapainya arah dan kebijakan ini antara lain:

- a. Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik;
- b. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke K/L/D/I;
- c. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam menghasilkan statistik sosial. Saat ini sudah banyak K/L/D/I yang mendapatkan asistensi dari Kedeputian Bidang Statistik Sosial;
- d. Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina SSN melalui pembinaan kepada pegawai terkait Satu Data Indonesia (SDI);
- e. Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral di bidang statistik sosial;
- f. Memaksimalkan peran BPS khususnya Deputi Bidang Statistik Sosial untuk SDI. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: Satu Data Bencana; Satu Data Ketenagakerjaan; Satu Data Kependudukan; dan Satu Data Kriminal; dan
- g. Menambah intensitas audiensi dengan K/L/D/I terkait untuk meningkatkan penjaminan kualitas data sektoral.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Statistik Sosial 2022

Dokumen perjanjian kinerja ditandatangani oleh Deputi Bidang Statistik Sosial dan Kepala BPS pada tanggal 19 Januari 2022. Dalam dokumen tersebut ditetapkan satuan dan target yang harus dicapai pada tahun 2022 dari setiap indikator sesuai tujuan/sasaran strategis.

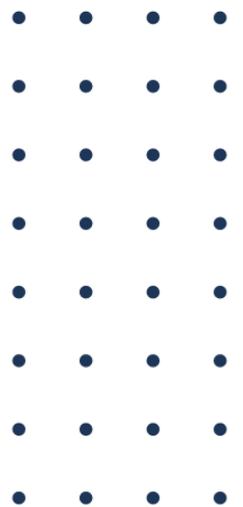
Tabel 2. 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Deputi Bidang Statistik Sosial

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sosial yang berkualitas	Persentase publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data	Persen	96
	Persentase indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN	Persen	100
	Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs	Persen	100
Tujuan 2. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di Bidang Statistik Sosial			
Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dari Kedeputian Bidang Statistik Sosial (%)	Persen	87
	Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Persen	100



03

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban dari Kedeputian Bidang Statistik Sosial dalam rangka menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis kinerja, sekaligus untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun secara periodik. Pengukuran kinerja diperlukan untuk memonitor pencapaian kinerja pada perjanjian kinerja, selanjutnya membandingkan antara rencana kinerja dengan capaian setiap indikator kinerja. Keberhasilan atau kegagalan suatu kinerja dilihat melalui hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan melalui indikator kinerja utama.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/ kegiatan di masa yang akan datang. Analisis akuntabilitas kinerja terdiri dari keberhasilan, kegagalan, tingkat efisiensi, hambatan/kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif untuk lebih meningkatkan kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial di masa yang akan datang. Dalam melakukan pengukuran kinerja, perlu juga dilakukan evaluasi dan analisis atas perbandingan antara:

- a. Realisasi Kinerja dengan kinerja yang direncanakan.
- b. Realisasi Kinerja dengan kinerja tahun sebelumnya.
- c. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir
- d. Realisasi Kinerja dengan Kinerja yang direncanakan Jangka Menengah (tahun 2022)

Pada tahun 2022, Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh sasaran dan IKU telah diukur capaian kinerjanya setiap triwulanan. Capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial tahun 2022 merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2022, dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi

dengan target Indikator Kinerja Utama pada masing-masing tujuan maupun sasaran, yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (revisi terakhir). Semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut akan menjadi capaian Indikator apabila nilainya sama atau kurang dari 120 persen. Bagi Indikator yang nilai capaiannya lebih dari 120 persen, maka nilai capaian kinerja yang disajikan pada laporan kinerja adalah 120 persen. Sementara, simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Kategori Penilaian

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	>100	Sangat Baik (A)	Kegiatan yang dilakukan telah melampaui target indikator kinerja
2	75-99	Baik (B)	Kegiatan yang dilakukan telah mencapai target indikator kinerja
3	55-74	Cukup (C)	Kegiatan yang dilakukan telah mendekati target indikator kinerja
4	<54	Kurang (K)	Kegiatan yang dilakukan tidak sesuai target indikator kinerja

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian tujuan Deputi Bidang Statistik Sosial "Menyediakan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan" dihitung dari nilai rata-rata capaian dari tiga indikator yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Sedangkan capaian tujuan "Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN", dihitung dari dua indikator. Secara detail capaian tersebut terdapat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3. 2. Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2022 (persen)

Indikator	Uraian	2022
(1)	(2)	(3)
Tujuan 1	Menyediakan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	103,21
Sasaran 1	Meningkatnya pemanfaatan data statistik sosial yang berkualitas	103,21
Tujuan 2	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	111,39
Sasaran 2	Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I	111,39
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Total		106,48

Rata-rata capaian pada indikator sasaran pada sasaran “Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sosial yang berkualitas” adalah sebesar 103,21 persen, sedangkan rata-rata capaian indikator sasaran “Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I” adalah sebesar 111,39 persen. Rata-rata capaian kinerja sasaran secara total adalah sebesar 106,48 persen. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator capaian telah masuk dalam kategori A (sangat baik) karena nilainya lebih dari 100 persen.

Jika dibandingkan kinerja pada tahun 2021, terdapat peningkatan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 6,95 persen yaitu dari 99,53 persen menjadi 106,48 persen. Pada tahun 2021, rata-rata capaian kinerja sasaran total belum mencapai 100 persen, sehingga hanya mendapat predikat Baik (B). Terdapat perbedaan tujuan dan sasaran pada tahun 2021 dan 2022, yaitu pada tahun 2021 terdapat tujuan “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN di Bidang Statistik Sosial”. Namun pada tahun 2022, sesuai renstra terbaru tujuan tersebut dihilangkan.

Tabel 3. 3. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2022

Kode	Uraian	Satuan	Deputi Bidang Statistik Sosial			Nilai
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T1 Menyediakan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					103,21	A
S1	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sosial yang Berkualitas				103,21	A
1.1	Persentase publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data (%)	Persen	96,97	100,00	103,12	A
1.2	Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	Persen	100,00	106,52	106,52	A
1.3	Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)	Persen	100,00	100,00	100,00	A
T2 Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN					111,39	A
S2	Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I				111,39	A
2.1	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari kedeputian bidang Statistik Sosial (%)	Persen	87,8	90,24	102,78	A
2.2	Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Persen	100,00	173,33	120,00	A

Lebih lanjut, pada sasaran “Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sosial yang Berkualitas” keseluruhan indikator kinerja utama telah mencapai 100 persen, bahkan dua indikator diantaranya lebih dari 100 persen sehingga keseluruhan indikator berkategori A. Begitu pula untuk sasaran ‘Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN”, keseluruhan indikator kinerjanya juga berkategori A karena nilainya lebih dari 100 persen (Tabel 3.3).

3.1.1. Capaian IKS 1.1.1. Persentase Publikasi Statistik Sosial yang Menyertakan Informasi Akurasi Data

Pengukuran Indikator “Persentase publikasi statistik sosial yang menyertakan informasi akurasi data” diukur dengan menghitung jumlah publikasi yang menyertakan informasi akurasi data dibagi dengan jumlah publikasi yang berbasis survei dikalikan dengan 100 persen. Nilai akurasi dalam publikasi ditunjukkan melalui tabel nilai *Relative Standard Error* (RSE). Dalam suatu survei terdapat kesalahan (*error*) yang disebabkan *sampling error* dan *non sampling error*. RSE dapat digunakan untuk mengukur tingkat presisi dari suatu nilai estimasi. RSE merupakan rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi dari suatu variabel/indikator yang dinyatakan dalam persentase. Estimasi suatu indikator dapat dikatakan tepat menggambarkan nilai yang sebenarnya jika memiliki nilai $RSE < 25$ persen, sebaliknya jika memiliki $RSE \geq 25$ persen maka dianggap tidak presisi. RSE yang tinggi (≥ 25 persen) merupakan suatu indikasi bahwa sampel tidak mencukupi, sehingga estimasi indikator yang dihasilkan sebaiknya tidak digunakan.

Tabel 3. 4. Persentase Publikasi Statistik Sosial yang Menyertakan Informasi Akurasi Data, Tahun 2022

Indikator	Uraian	Satuan	Kedeputan Bidang Statistik Sosial Tahun 2022			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Nilai
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1	Persentase publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data (%)	Persen	96,97	100,00	103,12	A

Capaian kinerja pada IKS “Persentase publikasi statistik sosial yang menyertakan informasi akurasi data” adalah 103,12 persen yang merupakan gabungan dari capaian kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan; Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Tabel 3. 5. Persentase Publikasi Statistik Sosial yang Menyertakan Informasi Akurasi Data Berdasarkan Direktorat, Tahun 2022

No	Direktorat	Satuan	Tahun 2022			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Nilai
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan	Persen	100,00	100,00	100,00	A
2	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Persen	100,00	100,00	100,00	A
3	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	A

Dari tabel 3.5 dapat dilihat bahwa pada masing-masing direktorat, yaitu Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, target capaian kinerja “Persentase publikasi statistik sosial yang menyertakan informasi akurasi data” adalah 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen.

Pada tahun 2022, terdapat 32 publikasi diterbitkan oleh Kedeputan Bidang Statistik Sosial dimana seluruhnya menyertakan informasi akurasi data, seperti yang disampaikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6. Daftar Publikasi dengan Menyertakan Nilai Akurasi Data yang Diterbitkan Kedeputan Bidang Statistik Sosial, Tahun 2022

No.	Judul Publikasi	Direktorat
(1)	(2)	(3)
1	Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2022	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
2	Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2022	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
3	Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2022	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
4	Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2022	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
5	Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2021	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
6	Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2022	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
7	Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2022	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan

No.	Judul Publikasi	Direktorat
(1)	(2)	(3)
8	Publikasi Statistik Pendapatan Februari 2022	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
9	Pendapatan Agustus 2022	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
10	Profil Migran Hasil Susenas 2021	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
11	Publikasi Metropolitan Statistic Area (MSA)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
12	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2021	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
13	Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, September 2021	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
14	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi, September 2021	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
15	Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2021	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
16	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2022	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
17	Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2022	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
18	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi, Maret 2022	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
19	Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2022	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
20	Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
21	Statistik Pendidikan 2022	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
22	Statistik Pemuda 2022	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
23	Statistik Lansia 2022	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
24	Statistik Sosial Budaya 2021	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
25	Statistik Penunjang Pendidikan 2021	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
26	Profil Anak Usia Dini 2022	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
27	Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2022	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
28	Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2022	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

No.	Judul Publikasi	Direktorat
(1)	(2)	(3)
29	Statistik Modal Sosial 2021	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
30	Statistik Kriminal 2022	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
31	Indeks Perilaku Anti Korupsi 2022	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
32	Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2022	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Kendala yang dihadapi Kedeputusan Bidang Statistik Sosial dalam mencapai indikator “Persentase publikasi statistik sosial yang menyertakan informasi akurasi data” yaitu sebagai berikut:

- a. Mengenai Sakernas, pada tahap pelatihan Innas dan Inda Sakernas Februari dan Agustus 2022 dilaksanakan secara *online*. Dalam pelatihan *online* ini, sering terjadi permasalahan jaringan sehingga hasilnya kurang optimal.
- b. Dalam proses validasi data Sakernas, ditemukan ada data-data ekstrim atau tidak wajar sehingga memerlukan konfirmasi dari bps daerah.
- c. Penghitungan nilai akurasi (RSE) yang cukup rumit karena perubahan susunan pertanyaan pada kuesioner.
- d. Pada Publikasi Profil Migran di subbab ketenagakerjaan dipertimbangkan untuk dihapus karena sumber data utama yang digunakan adalah Susenas bukan Sakernas.
- e. Penundaan kegiatan Long Form Sensus Penduduk 2020 di tahun 2021 karena *refocusing* sehingga baru dilaksanakan di tahun 2022. Hal ini menyebabkan beberapa output LF SP2020 yang seharusnya rilis di 2022 menjadi rilis di 2023.
- f. Jumlah hari pelatihan petugas Susenas tahun 2022 yang lebih singkat yaitu 2 (dua) hari, dimana pada tahun sebelumnya jumlah hari pelatihan adalah 3 (tiga) hari.
- g. Terdapat agenda supervisi Susenas Maret maupun September 2022 yang dibatalkan karena adanya pembatasan perjalanan dinas ataupun *refocusing* anggaran.
- h. Dalam rangka mengakomodir kebutuhan pemantauan dinamika kemiskinan untuk penurunan kemiskinan ekstrem, sampel Susenas Maret 2022 pada 212

kabupaten/kota merupakan sampel yang sama dengan Susenas Maret 2021 (panel).

- i. Dalam penyusunan publikasi Potensi Desa Indonesia 2021, beberapa hambatan yang dialami adalah proses pengolahan data Podes 2021 yang cukup memakan waktu sehingga dalam penyusunan publikasi sedikit terhambat.
- j. Dalam penyusunan *framework* Indeks Modal Sosial yang baru pada publikasi Statistik Modal Sosial 2021 dibutuhkan kajian literatur yang komprehensif. Bahan acuan yang digunakan didapatkan dari beberapa sumber seperti buku, jurnal internasional maupun jurnal nasional. Pengkajian literatur tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang.
- k. Dalam penyusunan Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2022 dan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022, mengalami beberapa kendala yaitu:
 - Data lingkungan hidup yang digunakan sebagian besar berasal dari *subject matter* dan instansi lain terkait, baik di pusat maupun di daerah. Sehingga keakuratan, validasi, dan *update* data terbaru sangat bergantung dari ketersediaan data yang ada di instansi.
 - Terdapat beberapa data yang tidak dapat disajikan secara series tahunan, karena instansi penyedia data tidak menyediakan datanya secara kontinyu setiap tahun.
 - Terdapat perbedaan format data dari kementerian/lembaga dengan format yang diinginkan BPS, sehingga membutuhkan waktu untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut.
 - Masih terdapat perbedaan konsep dan definisi oleh instansi terkait dengan data yang dibutuhkan BPS sehingga memerlukan waktu untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mencapai indikator tersebut antara lain:

- a. Akan diusulkan ke Biro Perencanaan untuk penyediaan anggaran pelatihan Innas dan Inda secara *offline*.
- b. Dilakukan konfirmasi data melalui email dan *whatsapp* ke BPS daerah terkait ditemukan ada data-data ekstrim pada hasil Sakernas.

- c. Penambahan personil untuk mengolah RSE dan penambahan waktu untuk penghitungan RSE.
- d. Pada Publikasi Profil Migran, subbab ketenagakerjaan dihapuskan.
- e. Kendala akibat tertundanya kegiatan LFSP2020 di tahun 2021 menjadi di tahun 2020 menyebabkan harus melakukan revisi PK 2022 dan Revisi Renstra 2020-2024.
- f. Menyelenggarakan sesi pembelajaran mandiri untuk pelatihan baik pelatihan instruktur maupun pelatihan petugas, memperkuat koordinasi dengan BPS daerah, dan menyesuaikan muatan kuesioner modul kesehatan perumahan pada pelaksanaan Susenas September 2022.
- g. Strategi dalam penyusunan publikasi Potensi Desa Indonesia 2021 untuk percepatan pengolahan data dan pemeriksaan publikasi dilakukan dengan melibatkan lebih banyak pegawai sehingga publikasi dapat diselesaikan tepat waktu.
- h. Strategi selama penyusunan publikasi Statistik Modal Sosial 2021 yaitu kegiatan kajian literatur tetap dilakukan semaksimal mungkin dengan tetap menjaga progres pembuatan publikasi yang tepat waktu
- i. Strategi dalam penyusunan Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2022 dan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022, yaitu publikasi yang dibuat menyesuaikan dengan data sekunder yang ada, namun dengan tetap menjaga kualitas.

3.1.2. Capaian IKS 1.1.2. Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan dalam Dokumen RPJMN (%)

Persentase indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN menunjukkan kemampuan Kedeputan Bidang Statistik Sosial untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan dalam dokumen RPJMN sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Capaian kinerja indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah indikator statistik sosial yang menjadi target akan digunakan dalam dokumen RPJMN dengan jumlah realisasi indikator RPJMN yang sudah tercapai oleh Kedeputan Bidang Statistik Sosial. Persentase indikator ini diukur dengan menghitung Jumlah indikator yang digunakan dalam dokumen RPJMN dibagi dengan Jumlah indikator RPJMN yang

harus disediakan oleh eluruh direktorat di Kedepuitan Bidang Statistik Sosial dikalikan dengan 100 persen

Tabel 3. 7. Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan dalam Dokumen RPJMN, Tahun 2022

Indikator	Uraian	Satuan	Kedepuitan Bidang Statistik Sosial Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.2	Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	Persen	100,00	106,52	106,52

Berdasarkan tabel 3.7, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN di Kedepuitan Bidang Statistik Sosial sebesar 106,52 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa dari Kedepuitan Bidang Statistik Sosial telah menyediakan Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pengukuran pembangunan nasional dalam RPJMN.

Tabel 3. 8. Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN, Berdasarkan Direktorat, Tahun 2022

No	Direktorat	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan	Persen	100,00	133,33	120,00
2	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Persen	100,00	100,00	100,00
3	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Persen	100,00	100,00	100,00

Tabel 3.8 menyajikan capaian kinerja “Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN” setiap direktorat pada Kedepuitan Bidang Statistik Sosial. Pada Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan capaian kinerja pada IKS ini sebesar 120 persen, sedangkan pada Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, capaian kerjanya masing-masing sebesar 100 persen.

Pada dokumen RPJMN 2020-2024 terdapat 50 indikator yang dihitung dari data Sakernas, Susenas, dan survei-survei lainnya yang dilakukan oleh Kedepujian Bidang Statistik Sosial. Selain itu indikator langsung maupun indikator sebagai penyusun indeks komposit. Indikator-indikator tersebut disajikan dalam publikasi yang diterbitkan BPS maupun dalam tabel dinamis di *website* BPS. Daftar indikator RPJMN yang dihasilkan Kedepujian Bidang Statistik Sosial pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9. Daftar Indikator Statistik Sosial yang Digunakan dalam Dokumen RPJMN Kedepujian Bidang Statistik Sosial, Tahun 2022

No.	Judul Publikasi	Direktorat
(1)	(2)	(3)
1	Rasio kewirausahaan nasional (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
2	Pertumbuhan wirausaha (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
3	Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
4	Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
6	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke bawah (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
7	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
8	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
9	Persentase lulusan PT yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
10	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

No.	Judul Publikasi	Direktorat
(1)	(2)	(3)
12	Angka pekerja anak	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
13	Persentase anak berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
14	Persentase anak berumur 5-17 tahun yang pernah mengakses internet	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
15	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
16	Persentase anak berumur 0-17 tahun yang konsumsi kalornya < 1400 kkal	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
17	Persentase anak berumur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
18	<i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
19	<i>Food Insecurity Experience Scale (FIES)</i>	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
20	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
21	Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
22	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun keatas	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
23	Harapan Lama Sekolah	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
24	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
25	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
26	Persentase Penduduk usia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
27	Persentase penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
28	Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
29	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
30	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
31	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

No.	Judul Publikasi	Direktorat
(1)	(2)	(3)
32	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
33	Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
34	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
35	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
37	Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
38	Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
39	Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
40	Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
41	Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
42	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
43	Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
44	Indeks Desa	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
45	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
46	Indeks Demokrasi Indonesia	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
47	Koefisien Gini Ratio September 2022	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
48	Koefisien Gini Ratio Maret 2023	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
49	Kemiskinan September 2022	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
50	Kemiskinan Maret 2023	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Kendala yang dihadapi Kedeputian Bidang Statistik Sosial dalam mencapai kinerja indikator “Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN,” yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tahap pelatihan Sakernas, pelatihan Innas dan Inda Sakernas Februari dan Agustus 2022 dilaksanakan secara *online*. Dalam pelatihan *online* ini, sering terjadi permasalahan jaringan sehingga hasilnya kurang optimal.
- b. Dalam proses validasi data Sakernas, ditemukan ada data-data ekstrim atau tidak wajar sehingga memerlukan konfirmasi dari BPS daerah.
- c. Penghitungan nilai akurasi (RSE) yang cukup rumit karena perubahan susunan pertanyaan pada kuesioner.
- d. Pada Publikasi Profil Migran di subbab ketenagakerjaan dipertimbangkan untuk dihapus karena sumber data utama yang digunakan adalah SUSENAS bukan Sakernas.
- e. Penundaan kegiatan Long Form Sensus Penduduk 2020 di tahun 2021 karena refocusing sehingga baru dilaksanakan di tahun 2022. Hal ini menyebabkan beberapa output LF SP2020 yang seharusnya rilis di 2022 menjadi rilis di 2023
- f. Permasalahan yang ditemukan dalam penyusunan Indeks Desa adalah terkait kebijakan penggunaan data jumlah desa yang digunakan, ada desa berdasarkan data Podes dan desa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 146 Tahun 2020. Perbedaan jumlah desa mengharuskan penghitungan pada dua versi jumlah desa tersebut.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mencapai kinerja indikator tersebut antara lain:

- a. Penyusunan sintak dilakukan secara berlapis, tidak hanya oleh satu orang.
- b. Penentuan target indikator berdasarkan dari dokumen RPJMN tahun 2021, kemudian realisasi indikator ditentukan dari dokumen RPJM tahun 2022.
- c. Publikasi MSA dan MPD yang tertunda dilakukan revisi laporan di tahun depan dan melakukan analisis MPD menggunakan data Survei Digital.
- d. Kegiatan LF SP2020 yang terkendala *refocusing* anggaran dilakukan revisi PK 2022 dan Revisi Renstra 2020-2024.
- e. Pada penghitungan indeks desa, membuat dua versi data saat pertama kali penghitungan Indeks Desa dilakukan.

3.1.3. Capaian IKS 1.1.3. Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan Sebagai Indikator SDGs (%)

Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs menunjukkan kemampuan Kedeputan Bidang Statistik Sosial untuk menghasilkan data dan informasi statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs. Capaian kinerja indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah indikator SDGs bidang statistik sosial yang bisa dipenuhi dibagi jumlah indikator SDGs yang menjadi target Bidang Statistik Sosial.

Tabel 3. 10. Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan sebagai indikator SDGs, Tahun 2022

Indikator	Uraian	Satuan	Kedeputan Bidang Statistik Sosial Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan sebagai indikator SDGs (%)	Persen	100	100	100

Target capaian kinerja “Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan sebagai indikator SDGs” adalah 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen. Nilai tersebut merupakan gabungan dari capaian kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Tabel 3. 11. Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan sebagai indikator SDGs Berdasarkan Direktorat, Tahun 2022

No	Direktorat	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Persen	100	100	100
2	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	100
3	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Persen	100	100	100

Pada masing-masing direktorat, yaitu Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, target capaian kinerja “Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan sebagai indikator SDGs” adalah 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen, dan capaian kinerja 100 person. Pada tahun 2022, terdapat 52 indikator SDGs yang dihasilkan oleh Kedeputan Bidang Statistik Sosial sebagaimana disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3. 12. Daftar Indikator Statistik Sosial yang Digunakan sebagai indikator SDGs yang Dihasilkan Kedeputan Bidang Statistik Sosial, Tahun 2022

No.	Indikator	Direktorat
(1)	(2)	(3)
1	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
2	Proporsi lapangan kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
3	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
4	Tingkat setengah pengangguran (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
5	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
6	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
7	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
8	Upah rata-rata per jam pekerja	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
9	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
10	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan (FIES)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
11	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur \geq 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
12	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
13	Persentase anak berumur 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

No.	Indikator	Direktorat
(1)	(2)	(3)
14	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
15	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
16	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
17	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
18	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
19	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
20	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
21	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
22	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
23	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
24	Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
25	Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar.	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
26	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
27	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
28	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
29	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

No.	Indikator	Direktorat
(1)	(2)	(3)
30	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
31	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
32	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
33	Jumlah desa tertinggal	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
34	Jumlah desa mandiri	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
35	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
36	Indeks Kebebasan	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
37	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
38	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
39	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
40	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
41	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
42	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
43	Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
44	Indeks Aspek Kebebasan	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
45	Indeks Aspek Kesetaraan	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
46	Koefisien Gini Ratio September 2022	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
47	Koefisien Gini Ratio Maret 2023	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

No.	Indikator	Direktorat
(1)	(2)	(3)
48	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur (%) September 2022	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
49	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur (%) Maret 2023	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
50	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur (%) September 2022	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
51	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur (%) Maret 2023	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
52	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. (%)	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Kendala yang dihadapi Kedepuyan Bidang Statistik Sosial dalam mencapai indikator “Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs” yaitu sebagai berikut:

1. Penghitungan indikator memerlukan ketelitian karena perubahan sintak yang digunakan terkait perubahan nomor urut pertanyaan dalam kuesioner.
2. Angka yang dihasilkan Sakernas Agustus 2021 mampu menyajikan indikator ketenagakerjaan hingga level kabupaten/kota, namun tidak semua indikator dalam SDGs dapat disajikan hingga level kabupaten/kota. Hal tersebut dikarenakan nilai RSE (*Relative Standar Error*) yang cukup tinggi.
3. Adanya penundaan kegiatan LF SP2020 di tahun 2021 karena *refocusing* anggaran juga menjadi kendala dalam pemenuhan indikator SDG's berdasarkan hasil LF SP2020.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan sintak dilakukan secara berlapis, tidak hanya oleh satu orang.
2. Kendala indikator SDGs yang memiliki nilai RSE yang cukup tinggi, diatasi dengan strategi menyajikan data SDGs hanya sampai level provinsi.
3. Melakukan revisi PK 2022 dan Revisi Renstra 2020-2024 terkait kendala indikator SDGs yang baru bisa dirilis tahun 2023 berdasarkan hasil LF SP2020.

3.1.4. Capaian IKS 2.2.1 Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Kedepuitan Bidang Statistik Sosial (%)

Sasaran Strategis 2: Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I

Indikator kinerja sasaran Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Kedepuitan Bidang Statistik Sosial diukur dengan menghitung jumlah K/L/D/I yang telah mendapatkan pembinaan statistik dibagi dengan jumlah seluruh K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Pada tahun 2022, K/L/D/I yang direncanakan mendapat pembinaan statistik adalah sebanyak 36 K/L/D/I. Jumlah tersebut menjadi target K/L/D/I atau sebesar 87,80 persen. K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3. 13. Target dan Realisasi K/L/D/I yang Mendapat Pembinaan Statistik dari Kedepuitan Bidang Statistik Sosial

IKS 2.2.1	Target K/L/D/I	Realisasi K/L/D/I
(1)	(2)	(3)
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Kedepuitan Bidang Statistik Sosial (%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Indonesia 2. BAPPENAS 3. BKKBN 4. BMKG 5. BNPB 6. BP2MI 7. BPIP 8. DitjenPAS 9. Kejaksaan 10. Kemendagri 11. Kemendes PDTT 12. Kemendikbudristek 13. Kemenhub 14. Kemenkes 15. Kemenkeu 16. Kemenko PMK 17. Kemenkopohlukam 18. Kemenkumham (Ditjen Imigrasi) 19. Kemenparekraf 20. Kemenpora 21. Kemensos 22. Kementan 23. Kemenlu 24. Kemnaker 25. KKP 26. KLHK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Indonesia 2. BAPPENAS 3. BKKBN 4. BMKG 5. BNPB 6. BP2MI 7. BPIP 8. DitjenPAS 9. Kejaksaan 10. Kemendagri 11. Kemendes PDTT 12. Kemendikbudristek 13. Kemenhub 14. Kemenkes 15. Kemenkeu 16. Kemenko PMK 17. Kemenkopohlukam 18. Kemenkumham (Ditjen Imigrasi) 19. Kemenparekraf 20. Kemenpora 21. Kementan 22. Kemenlu 23. Kemnaker 24. KKP 25. KLHK 26. KPK 27. KPPPA 28. KPU

IKS 2.2.1	Target K/L/D/I	Realisasi K/L/D/I
(1)	(2)	(3)
	27. KPK 28. KPPPA 29. KPU 30. MA 31. "National Food Agency (NFA)/ Badan Pangan Nasional" 32. Polri 33. Provinsi Sumatera Utara 34. Setwapres 35. TNP2K 36. Kemenag	29. MA 30. "National Food Agency (NFA)/ Badan Pangan Nasional" 31. Polri 32. Provinsi Sumatera Utara 33. Setwapres 34. TNP2K 35. Kemenag 36. BRIN 37. Kemenhan 38. Kemen PUPR

Berdasarkan tabel 3.13, realisasi K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Kedepuitan Bidang Statistik Sosial pada tahun 2022 adalah sebanyak 38 K/L/D/I atau 90,24 persen. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa terdapat perubahan K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik, dibandingkan K/L/D/I yang ditargetkan. Kementerian Sosial pada awalnya ditargetkan mendapat pembinaan statistik untuk kegiatan-kegiatan tertentu tidak berhasil dilaksanakan karena adanya berbagai kendala. Sementara, BRIN, Kemenhan, dan Kemen PUPR yang di awal tidak masuk dalam target, menerima pembinaan statistik dari Kedepuitan Bidang Statistik Sosial, sehingga BRIN, Kemenhan, dan Kemen PUPR masuk menjadi realisasi K/L/D/I. Oleh karena itu, realisasi K/L/D/I yang mendapat pembinaan adalah sebesar 90,24 persen dari target 87,80 persen, sehingga capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 102,80 persen.

Tabel 3. 14. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 2.2.1)
Kedeputan Bidang Statistik Sosial

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target 2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SS.2. Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I							
IKS 2.2.1 Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Kedeputan Bidang Statistik Sosial (%)	persen	-	-	-	87,80	90,24	102,80

Kendala IKS 2.2.1

Dalam merealisasikan indikator kinerja sasaran ini, pada tahun 2022 terdapat beberapa kendala yang terjadi, antara lain:

1. Proses penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kemenparekraf memerlukan waktu dan koordinasi yang relatif rumit.
2. Terdapat miskomunikasi dengan Kementerian Sosial yang mengakibatkan pembinaan statistik tidak dapat terlaksana. Selain itu, karena tidak jadi dilaksanakannya kegiatan DTKS tahun 2022, membuat pembinaan dengan Kemensos tidak dilaksanakan.
3. Mundurnya realisasi pembinaan sektoral Provinsi Sumatera Utara, yang semula dijadwalkan pada triwulan III tidak terlaksana dikarenakan belum menemukan waktu yang tepat terkait masih dilakukannya penghitungan indikator LF SP2020 yang cukup rumit dan kompleks.
4. Karena adanya kegiatan *ad hoc* yang cukup besar yakni Pendataan Awal Regsosek, sangat sulit untuk menentukan waktu dan jadwal yang tepat untuk melakukan pembinaan pada K/L/D/I yang akan dibina.

Strategi IKS 2.2.1

Sementara, strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Mengupayakan koordinasi secara terus-menerus dengan Kemenparekraf agar target pelaksanaan kegiatan pembinaan bisa terealisasi.
2. Mengusulkan waktu pelaksanaan aktivitas yang disetujui bersama agar Kemensos dapat menerima pembinaan statistik.
3. Melaksanakan koordinasi dengan BPS Provinsi Sumatera Utara terkait waktu pelaksanaan pembinaan. Pelaksanaan pembinaan statistik pada BPS Provinsi Sumatera Utara bisa terlaksana pada triwulan IV tahun 2022.
4. Memanajemen waktu supaya kegiatan pembinaan tetap berjalan dengan baik saat terdapat kegiatan besar.

3.1.5. Capaian IKS 2.2.2 Persentase Aktivitas Pembinaan Statistik yang Dilakukan untuk K/L/D/I yang Telah Direalisasikan (%)

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah kegiatan atau aktivitas pembinaan statistik yang telah dilakukan dibagi dengan jumlah seluruh aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang direncanakan, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Aktivitas pembinaan statistik sosial yang direncanakan di tahun 2022 adalah sebesar 60 aktivitas dari 40 K/L/D/I. Jumlah tersebut menjadi target aktivitas pembinaan statistik atau sebesar 100 persen. Rincian target dan realisasi aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 15. Target dan Realisasi Jumlah Aktivitas Pembinaan Statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I, Tahun 2022

IKS 2.2.2	Target		Realisasi	
	K/L/D/I	Jumlah Aktivitas	K/L/D/I	Jumlah Aktivitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	BKKBN	4	BKKBN	4
	Kementerian PPN/Bappenas	8	Kementerian PPN/Bappenas	13
	BMKG	1	BMKG	1
	BNPB	1	BNPB	5
	BPIP		BPIP	1
	BRIN		BRIN	6
	DitjenPAS	1	DitjenPAS	1
	Kejaksanaan	1		2

IKS 2.2.2	Target		Realisasi	
	K/L/D/I	Jumlah Aktivitas	K/L/D/I	Jumlah Aktivitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kementerian Dalam Negeri	2	Kementerian Dalam Negeri	2
	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	7	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	13
	Kementerian Pertahanan		Kementerian Pertahanan	1
	Kementerian Kesehatan	2	Kementerian Kesehatan	2
	Kementerian Keuangan	2	Kementerian Keuangan	7
	Kemenko PMK	1	Kemenko PMK	1
	Kemenko Polhukam	1	Kemenko Polhukam	4
	Kementerian Pariwisata dan Ekraf	12	Kementerian Pariwisata dan Ekraf	13
	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1
	Kementerian Sosial	1	Kementerian Sosial	
	Kementerian Pertanian	1	Kementerian Pertanian	1
	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2
	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	Komisi Pemberantasan Korupsi	2
	Kementerian PPPA	4	Kementerian PPPA	8
	MA	1	MA	1
	Badan Pangan Nasional	1	Badan Pangan Nasional	1
	Polri	1	Polri	3
	Prov. Sumatera Utara	1	Prov. Sumatera Utara	1
	Kementerian PUPR		Kementerian PUPR	2
	Setwapres	1	Setwapres	1
	TNP2K	1	TNP2K	3
	Kementerian Luar Negeri	1 (Kegiatan SDMI)	Kementerian Luar Negeri	2 (Kegiatan SDMI)
	Kementerian Ketenagakerjaan		Kementerian Ketenagakerjaan	
	Kementerian Hukum dan HAM		Kementerian Hukum dan HAM	
	Kementerian Keuangan		Kementerian Keuangan	

IKS 2.2.2	Target		Realisasi	
	K/L/D/I	Jumlah Aktivitas	K/L/D/I	Jumlah Aktivitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kementerian Sosial		Bank Indonesia	
	Kementerian Perhubungan		Kementerian Perhubungan	
	Kemendes PDTT		Kemendes PDTT	
	BP2MI		BP2MI	
	KPU		KPU	
	Bank Indonesia		Kementerian PPPA	
Jumlah Aktivitas		60		104

Realisasi K/L/DI yang mendapat pembinaan statistik pada tahun 2022 adalah sebanyak 104 aktivitas atau 173,33 persen. Hal tersebut karena terdapat beberapa K/L/D/I yang menambah aktivitas, serta pelaksanaan aktivitas pembinaan dengan BPIP, BRIN, Kementarian Pertahanan, dan Kementerian PUPR yang tidak terdapat pada target sehingga capain kinerja pada tahun 2022 untuk indikator aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I adalah 120 persen. Pada tahun 2021, IKS ini tidak tersedia berdasar review Renstra dan Review PK terakhir.

Kedeputan Bidang Statistik Sosial (Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan) pada tahun 2022 melaksanakan kegiatan FGD dan Workshop Satu Data Migrasi Internasional yang diikuti oleh 9 K/L/D/I yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kemendes PDTT, BP2MI, dan KPU. Kegiatan ini ditargetkan dilakukan sebanyak satu kali, namun realisasinya dilakukan dua kali.

Tabel 3. 16. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 2.2.2)
Kedeputan Bidang Statistik Sosial

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target 2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SS.2. Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I							
IKS 2.2.2 Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	persen	-	-	-	100,00	173,33	120,00

Kendala IKS 2.2.2

Dalam merealisasikan indikator kinerja sasaran ini, pada tahun 2022 terdapat beberapa kendala yang terjadi, antara lain:

1. Aktivitas penyusunan publikasi data tenaga kerja parekraf yang disusun oleh dua pihak yaitu Tim Statistik Ketenagakerjaan (BPS) dan Tim Parekraf (Kemenparekraf) membutuhkan waktu dan kesigapan untuk melakukan koordinasi.
2. Sulit untuk menentukan jadwal aktivitas pembinaan statistik yang disepakati bersama karena perlu memastikan kesediaan waktu dari dua pihak.
3. Mundurnya realisasi pembinaan sektoral Provinsi Sumatera Utara dikarenakan perlunya melakukan penghitungan indikator LF SP2020 sebagai data pembandingan dalam pembinaan sektoral.
4. Sulit menentukan jadwal untuk melakukan aktivitas pembinaan, terlebih saat ada kegiatan besar pendataan Regsosek.
5. Untuk kegiatan Satu Data Statistik Kriminal Indonesia (SDSKI), yang memerlukan rapat koordinasi dengan berbagai K/L/D/I yang dinilai penting karena untuk menyamakan persepsi dalam pemetaan ICCS dan KUHP memiliki kendala pada biaya.

Strategi IKS 2.2.2

Sementara, strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut.

1. Responsif terhadap masukan dan review dalam penyempurnaan publikasi.
2. Meningkatkan upaya koordinasi dengan K/L/D/I terkait agar menemukan waktu pelaksanaan pembinaan aktivitas statistik yang disetujui Bersama.
3. Menentukan dan mengkomunikasikan dengan K/L/D/I terkait jadwal yang tepat untuk berkoordinasi.
4. Tetap melakukan rapat koordinasi secara *fullday meeting* untuk aktivitas pembinaan K/L/D/I di kegiatan SDSKI yang dananya didapat dari revisi anggaran SPAK.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kedepuitan Bidang Statistik Sosial merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2022, dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja utama pada masing-masing tujuan maupun sasaran, yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Hal ini dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan pada rencana kerja di tahun berikutnya. Perkembangan capaian kinerja Kedepuitan Bidang Statistik Sosial pada tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 17. Perkembangan Capaian Kinerja Kedepuitan Bidang Statistik Sosial Tahun 2021-2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja (%)	
			2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1 (2021 & 2022) : Menyediakan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
SS1 (2021 & 2022): Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sosial yang berkualitas	1.1 Persentase publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data	Persen	107,97	103,12
	1.2 Persentase indikator Statistik Sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN	Persen	100	106,52
	1.3 Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs	Persen	100	100
T2 (2022) : Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				
SS2 (2022) : Penguatan Statistik sektoral K/L/D/I	2.1. Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dari kedepuitan bidang Statistik Sosial	Persen	-	102,78
	2.2 Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan	Persen	-	120
T2 (2021) : Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN di Bidang Statistik Sosial				
SS2 (2021) : Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN di	2.1 Persentase K/L/D/I yang telah menerapkan standar Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persen	99,61	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja (%)	
			2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
bidang Statistik Sosial				
T3 (2021) : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan				
SS3 (2021) : Penguatan Statistik sektoral K/L/D/I	3.1 Persentase K/L/D/I yang mendapat <i>technical assistance</i> Statistik Sosial	Persen	90,05	-
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran			99,53	106,48

Tabel di atas menunjukkan bahwa bahwa pada tahun 2021 dan 2022 terdapat sedikit perbedaan dari sisi tujuan, sasaran strategis maupun indikator kinerja dari Kedepuitan Bidang Statistik Sosial. Perubahan-perubahan tersebut pada aspek nomenklatur, konsep, dan definisi serta formula yang menyesuaikan dengan reuiu renstra Kedepuitan Bidang Statistik Sosial 2020-2024.

Pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis pertama mempunyai nomenklatur yang sama antara tahun 2020 dan 2021. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, pada tujuan Kedepuitan Bidang Statistik Sosial terdapat peningkatan sebesar 6,5 persen untuk capaian indikator sasaran yaitu “Statistik Sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN”. Tetapi peningkatan tersebut tidak sejalan dengan capaian indikator sasaran “publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data” yang mengalami penurunan sebesar 4,87 persen dibanding tahun 2021 menjadi 103,1 persen pada tahun 2022.

Dari evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas Kedepuitan Bidang Statistik Sosial tahun 2022 memperlihatkan capaian yang sangat baik. Capaian indikator kinerja Kedepuitan Bidang Statistik Sosial terhadap perjanjian kinerja memiliki rata-rata capaian 106,48 persen mengalami peningkatan 6,95 persen dibanding Tahun 2021.

3.3. Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2020-2024

Perbandingan capaian kinerja tahunan terhadap rencana kinerja jangka menengah merupakan hal yang yang perlu dipantau. Pengukuran capaian kinerja Kedepuitan Bidang Statistik Sosial tahun 2022 terhadap Renstra dihitung berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target Renstra yang dinyatakan

dalam persen, pada masing-masing tujuan/sasaran dan indikator kinerja. Kedeputusan Bidang Statistik Sosial telah melakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2022 terhadap rencana kinerja jangka menengah yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 18. Capaian Kinerja Tahun 2021-2022 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2020-2024

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	2021		2022	
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan 1: Menyediakan data Statistik Sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan						
Sasaran 1: Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sosial yang berkualitas						
IKS 1.1.1 Persentase publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data (%)	persen	100,00	96	109	100	103,12
IKS 1.1.2 Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	persen	100,00	100	100	106,52	106,52
IKS 1.1.3 Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)	persen	100,00	116	118	100	100
Tujuan 2: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN						
Sasaran 2: Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I						
IKS 2.2.1 Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari kedeputusan bidang Statistik Sosial (%)	persen	100,00			90,24	102,78
IKS 2.2.2 Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	persen	100,00			173,33	120
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran				109		106,48

Dari tabel tersebut, pada tahun 2022, capaian kinerja sudah optimal. Bahkan terdapat 4 dari 5 IKS dengan capaian kinerja lebih dari 100 persen. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 106,48 persen.

3.4. Prestasi Tahun 2022

Selama tahun 2022 Direktorat di lingkungan Kedepuyan Bidang Statistik Sosial yaitu Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Direktorat Statistik ketahanan Sosial telah berhasil memperoleh penghargaan maupun prestasi baik secara unit kerja maupun perorangan. Berikut beberapa penghargaan/prestasi yang berhasil ditorehkan selama tahun 2022 menurut masing-masing direktorat :

1. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Sepanjang tahun 2022, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah berhasil melaksanakan *employee of the month* dan *employee* triwulanan sebagai hasil penilaian kinerja individu untuk pengembangan karir individu. Selain itu, adanya proses pemilihan *employee of the month* dan *employee* triwulanan juga merupakan salah satu bentuk pemberian *reward* kepada pegawai, dimana pegawai yang terpilih sebagai *employee of the month* akan diberikan kuota *work from office* (WFO) yang lebih sedikit dibanding pegawai lain. Prestasi lainnya di tahun 2022 yaitu Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah berhasil mendapatkan Juara 2 (dua) dalam lomba Kebersihan Hari Statistik Nasional (HSN) 2022. Selain itu, secara perorangan, ada beberapa pegawai Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memperoleh penghargaan atas prestasi baik pada *event* nasional maupun internasional, diantaranya adalah:

- a. Jondan Indhy Prastyo menghasilkan karya tulis yang berhasil dipublikasikan pada jurnal *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning* (JISDeP).
- b. Suryo Adi Rahmawan berhasil memenangkan lomba karya tulis kategori *general paper* dan *modelling paper* pada *East Java Economic Forum* (EJAVEC).
- c. Nenry Aditina menghasilkan karya tulis yang berhasil dipublikasikan pada jurnal *Asian Economic and Financial Review*.

- d. Sri Wahyuni dan Ari Purbowati sebagai Narasumber pada *United Nations Expert Group Meeting : Innovative methods to measure the impact of COVID-19 on mortality through surveys and censuses*.
- e. Diah Ikawati sebagai Presenter pada the 11th *Session of OIC Statistical Commission, 18-19 Oktober 2022*, yang diadakan oleh *Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC)*.

2. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Selama tahun 2022 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat berhasil memperoleh beberapa penghargaan atas prestasi pegawai antara lain :

- a. Saudara Ofi Ana Sari menjadi Insan Statistisi Teladan Direktorat Kesra mewakili Kedeputian Bidang Statistik Sosial
- b. Saudara Amiek Chamami mendapatkan penghargaan Juara II Diklat Karya Tulis Ilmiah, dengan sertifikat terlampir
- c. Saudara Rida Agustina menghasilkan karya tulisan yang dipublikasi dalam kumpulan karya prosiding:

<https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/view/1551>

Selain itu Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat juga menghasilkan beberapa inovasi selama tahun 2022, antara lain:

- a. Melakukan pengembangan penghitungan indikator menggunakan metode statistik *Small Area Estimation (SAE)* untuk menyediakan indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*. Inovasi ini dilakukan bersama Politeknik STIS dengan membangun *Rpackage* untuk mempermudah penghitungan SAE.
- b. *Sharing knowledge* terkait penelitian disertasi oleh pegawai Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang baru menyelesaikan pendidikan S2.

3. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Selama tahun 2022, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah menorehkan beberapa prestasi pegawai baik *event* nasional maupun internasional diantaranya :

- a. Lutfi Alfia S.Si, M.AP. menjadi narasumber dalam *Stats Café : Measuring Economic Loss from Disasters yang diadakan oleh UN ESCAP* pada 21 November 2022.

- b. Novilya Limayani SST, M.Sc. menjadi narasumber dalam *SESRIC Webinar Series on Statistical Experience Sharing “Experiences of OIC Countries in Producing Disaster Related Statistics”* yang diadakan oleh SESRIC pada 16 Juni 2022.
- c. Pramudya Ajeng Safitri S.Si., M.E. mewakili Direktur Statistik Ketahanan Sosial menjadi salah satu narasumber di *Talkshow at the Global Platform for Disaster Reduction on “MAKING DISASTER RISKS COUNT: Progressing the Indonesia One Disaster Data in the National Statistical System”* pada 25 Mei 2022 di Bali.
- d. Pramudya Ajeng Safitri S.Si., M.E. menjadi salah satu pembicara pada *17th Meeting of TWG on Disaster-related Statistics* oleh UN ESCAP pada 27 April 2022.
- e. Masfufah, S.ST, SE, MSi Menjadi narasumber pada acara *Talkshow* di Kompas TV terkait Regsosek Tahun 2022.
- f. Nuri Taufik, S.ST, M.E.K.K menjadi Peserta terbaik dalam kegiatan *Capacity Buiding* Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2022.

Selain itu selama tahun 2022, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial juga telah berkontribusi secara aktif dalam mendukung pencapaian *Quick Win* Deputi Bidang Statistik Sosial (DBSS) yang meliputi :

- a. Penanganan Kemiskinan, dengan melakukan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
- b. Digitalisasi Administrasi Pemerintah, melalui Aplikasi Integrated Collection System (ICS), Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) dan Indonesia Data Hub (INDAH).
- c. Satu Data Indonesia, melalui dukungan terhadap pencapaian Satu Data Indonesia, Satu Data Desa Indonesia, Satu Data Bencana Indonesia, Satu Data Statistik Kriminal Indonesia, Desa Cinta Statistik dan Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Penyediaan Indikator RPJMN dan SDGs.

3.5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Deputi Bidang Statistik Sosial didukung oleh dana yang bersumber dari APBN serta Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Anggaran keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Deputi Bidang Statistik Sosial telah didasarkan pada Rencana Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial tahun 2020-2024 dan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Dalam pengelolaan/penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio kehematan, efisiensi, efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3. 19. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial Berdasarkan Direktorat Periode 2022

Unit Kerja	2022		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan	40.766.696.506	36.665.304.026	89,94
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	2.846.200.000	2.727.298.502	95,82
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	30.906.319.000	25.678.554.479	83,09
Total	74.519.215.506	65.071.157.007	89,62

Secara total, pagu Deputi Statistik Sosial adalah sebesar Rp. 74.519.215.506,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.071.157.007,- atau sebesar 89,62 persen.

Tabel 3. 20. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial Berdasarkan Sasaran dan Program Periode 2022

Tujuan/Sasaran Strategis/Program		Realisasi Anggaran		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realiasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
[2905] Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan		40.766.696.506	36.665.304.026	89,94
T1	Menyediakan data statistik kependudukan dan ketenagakerjaan untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
S1	Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	40.752.119.506	36.651.555.686	89,94

Tujuan/Sasaran Strategis/Program		Realisasi Anggaran		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realiasi
1.1	Persentase publikasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang menyertakan informasi akurasi data (%)	39.313.626.506	35.624.248.488	90,62
1.2	Persentase Indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)			
1.3	Persentase indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)	1.438.493.000	1.027.307.198	71,42
T2	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di Bidang Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan			
S2	Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I	14.577.000	13.748.340	94,32
2.1	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (%)	14.577.000	13.748.340	94,32
2.2	Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)			
[2906] Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat		2.846.200.000	2.727.298.502	95,82
T1	Menyediakan data Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	2.831.964.000	2.713.973.102	95,83
S1	Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	2.831.964.000	2.713.973.102	95,83
1.1	Persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data (%)	2.831.964.000	2.713.973.102	95,83
1.2	Persentase Indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)			
1.3	Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)			
T2	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang kesejahteraan rakyat	14.236.000	13.325.400	93,6
S2	Penguatan Statistik sektoral K/L/D/I di bidang Statistik Kesejahteraan Rakyat	14.236.000	13.325.400	93,6
2.1	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (%)	14.236.000	13.325.400	93,6
2.2	Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)			
[2907] Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial		30.906.319.000	25.678.554.479	83,09
T1	Menyediakan data Statistik Ketahanan Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
S2	Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas	30.876.033.000	25.652.843.823	83,08
1.1	Persentase Publikasi Statistik Ketahanan Sosial yang diakses konsumen (%).	30.876.033.000	25.652.843.823	83,08

Tujuan/Sasaran Strategis/Program		Realisasi Anggaran		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realiasi
1.2	Persentase Indikator statistik ketahanan sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)			
1.3	Persentase indikator statistik ketahanan sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)			
T2	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di bidang statistik ketahanan sosial			
S2	Penguatan Statistik sektoral K/L/D/I di bidang Statistik ketahanan sosial	30.286.000	25.710.656	84,89
2.1	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (%)	30.286.000	25.710.656	84,89
2.2	Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)			

3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi dilakukan Deputi Bidang Statistik Sosial mencakup sisi anggaran dan non anggaran. Upaya efisiensi ini sesuai dengan surat edaran dari Menteri Keuangan tanggal 29 November 2021 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dimana adanya arahan dari presiden untuk dilakukan suatu langkah strategis pada tahun 2022 dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi COVID-19, yaitu dengan melakukan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sebesar 5% pada tiap kementerian/lembaga (K/L).

Selain itu pada tahun 2022 juga terdapat surat edaran dari Menteri Keuangan tertanggal 23 Mei 2022 terkait Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. Hal ini dikarenakan adanya peningkatanketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik sehingga perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional, antara lain dengan melakukan *automatic adjustment* pada semua K/L. Demikian halnya anggaran tahun 2022 di Deputi Bidang Statistik Sosial juga dilakukan *automatic adjustment*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, efisiensi didapatkan dengan cara sebagai berikut:

Tabel 3. 21. Efisiensi Anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial Berdasarkan Direktorat Periode 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Program	Capaian Kinerja (%)	Pagu TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan						
Tujuan 1 Menyediakan data statistik kependudukan dan ketenagakerjaan untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan						
SS1: Tersedianya data statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang berkualitas	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	106,67	40.752.119.506	36.651.555.686	89,94	15,69
Tujuan 2. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di Bidang Statistik Kependudukan dan ketenagakerjaan						
SS2: Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I	Pembinaan Statistik Sektoral Kependudukan dan Ketenagakerjaan	100	14.557.000	13.748.340	94,31	5,68
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat						
Tujuan 1 Menyediakan data Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan						
SS1: pemanfaatan data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	100,00	2.831.964.000	2.713.973.102	95,83	4,17
Tujuan 2. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang kesejahteraan rakyat						
SS2: Penguatan Statistik sektoral K/L/D/I di bidang Statistik Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan Statistik Sektoral Kependudukan dan Ketenagakerjaan	114,90	14.236.000	13.325.400	93,60	18,54
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial						
Tujuan 1. Menyediakan data Statistik Ketahanan Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan						

Tujuan/ Sasaran Strategis	Program	Capaian Kinerja (%)	Pagu TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SS1: Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	100	30.876.033.000	25.652.843.823	83,08	16,92
Tujuan 2. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di bidang statistik ketahanan sosial						
SS2: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	112,94	30.286.000	25.710.656	84,89	24,84

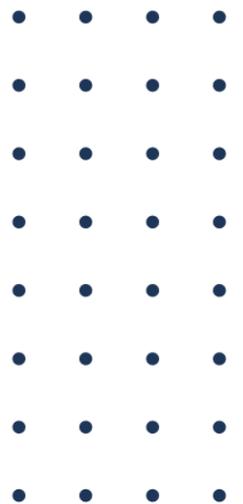
Upaya efisiensi yang dilakukan oleh Deputi Statistik Sosial adalah:

1. Dari sisi sumber daya energi, dilakukan penghematan listrik dengan cara mematikan lampu atau alat elektronik lainnya yang tidak digunakan, efisiensi penggunaan air yang diupayakan melibatkan seluruh staf sehingga penggunaan fasilitas kantor dapat diefisienkan.
2. Penggunaan media *online* dalam pelaksanaan rapat.
3. Pelaksanaan beberapa pelatihan dilakukan secara online, kecuali pelatihan petugas dilakukan secara offline.
4. Penggunaan media *online* dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
5. Menggabungkan beberapa jadwal kegiatan
6. Penghematan dalam penggunaan kertas, dengan cara tidak mengalokasikan anggaran pencetakan publikasi melainkan hanya menyediakan versi *softcopy*, mencetak draft laporan dan dokumen lainnya yang masih akan dikoreksi dengan menggunakan kertas bekas atau melalui *softfile*.
7. Membatasi penggunaan tinta printer dengan menggunakan mode "hemat" saat melakukan pencetakan dokumen sehingga menghemat tinta printer.
8. Penggunaan sensor gerak lampu pada setiap toilet, dimana apabila tidak ada orang yang menggunakan toilet dalam rentang waktu tertentu, lampu akan mati secara otomatis.



04

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial pada tahun 2022 secara rata-rata mencapai 106,48 persen, dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 89,62 persen. Dari lima indikator kinerja yang ditetapkan melalui perajajian kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial dengan Kepala Badan Pusat Statistik, seluruh indikator kinerja mampu memenuhi target yaitu sebesar 100 persen bahkan sebagian besar, 4 dari 5 indikator, mencapai lebih dari 100 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja baik dari keseluruhan indikator tujuan maupun pada masing-masing indikator sasaran telah mencapai nilai 100 persen atau lebih dan masuk dalam kategori A.

Kedeputian Bidang Statistik Sosial pada tahun 2022 berhasil mempertahankan capaian kinerja dalam kategori A sebagaimana capaian kinerja pada tahun 2021. Capaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN” mengalami peningkatan 6,52 persen. Sementara itu, indikator kinerja dengan capaian kinerja tertinggi pada tahun 2022 adalah “Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan” yang mencapai 120 persen. Kedeputian Statistik Sosial pada tahun 2022 berhasil mempertahankan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja di atas 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial pada tahun 2022 telah optimal baik pada indikator kinerja tujuan maupun sasaran.

Anggaran Kedeputian Statistik Sosial secara keseluruhan sebesar Rp 74.519.215.506,- yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial. Sampai dengan 31 Desember 2022 serapan anggaran seluruh kegiatan sebesar Rp 65.071.157.007,- atau 89,62 persen dari total anggaran.

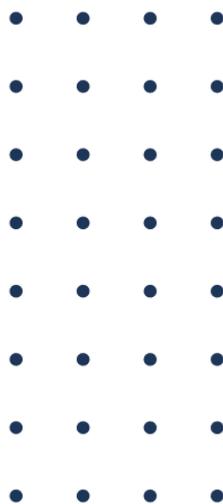
4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dalam upaya meningkatkan nilai capaian kinerja seperti yang telah ditetapkan pada renstra tahun 2020-2024, perbaikan yang harus dilakukan Kedeputian Bidang Statistik Sosial pada tahun mendatang adalah:

1. Mengusulkan ke Biro Perencanaan untuk penyediaan anggaran pelatihan Innas dan InDa secara luring agar penyampaian materi lebih optimal dan pemahaman innas dan inDa terhadap materi pelatihan semakin baik;
2. Menyelenggarakan sesi pembelajaran mandiri untuk pelatihan baik pelatihan instruktur maupun pelatihan petugas, memperkuat koordinasi dengan BPS daerah, dan lebih selektif dalam menetapkan variabel dalam kuesioner sehingga muatan materi yang disampaikan dapat sesuai dengan keterbatasan waktu pelatihan petugas.
3. Melakukan konfirmasi data melalui email dan Whatsapp ke BPS daerah terkait temuan data-data ekstrim pada hasil survei;
4. Penambahan personil untuk mengolah RSE dan penambahan waktu untuk penghitungan RSE;
5. Menerapkan penyusunan sintak tabulasi indikator dan statistik secara berlapis, tidak hanya oleh satu orang;
6. Menyajikan data SDGs hanya sampai level provinsi untuk mengatasi kendala indikator SDGs tingkat Kabupaten/kota yang memiliki nilai RSE cukup tinggi;
7. Melakukan revisi PK 2022 dan Revisi Renstra 2020-2024 terkait kendala indikator SDGs yang baru bisa dirilis tahun 2023 berdasarkan hasil LF SP2020.
8. Mengupayakan koordinasi secara terus-menerus dengan K/L/D/I agar target pelaksanaan kegiatan pembinaan bisa terealisasi;
9. Memanajemen waktu supaya kegiatan pembinaan tetap berjalan dengan baik saat terdapat kegiatan besar;
10. Berkoordinasi dengan Tim Penilai Badan BPS untuk menjadikan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagai dasar aktivitas pembinaan pada K/L/D/I mitra kerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial.

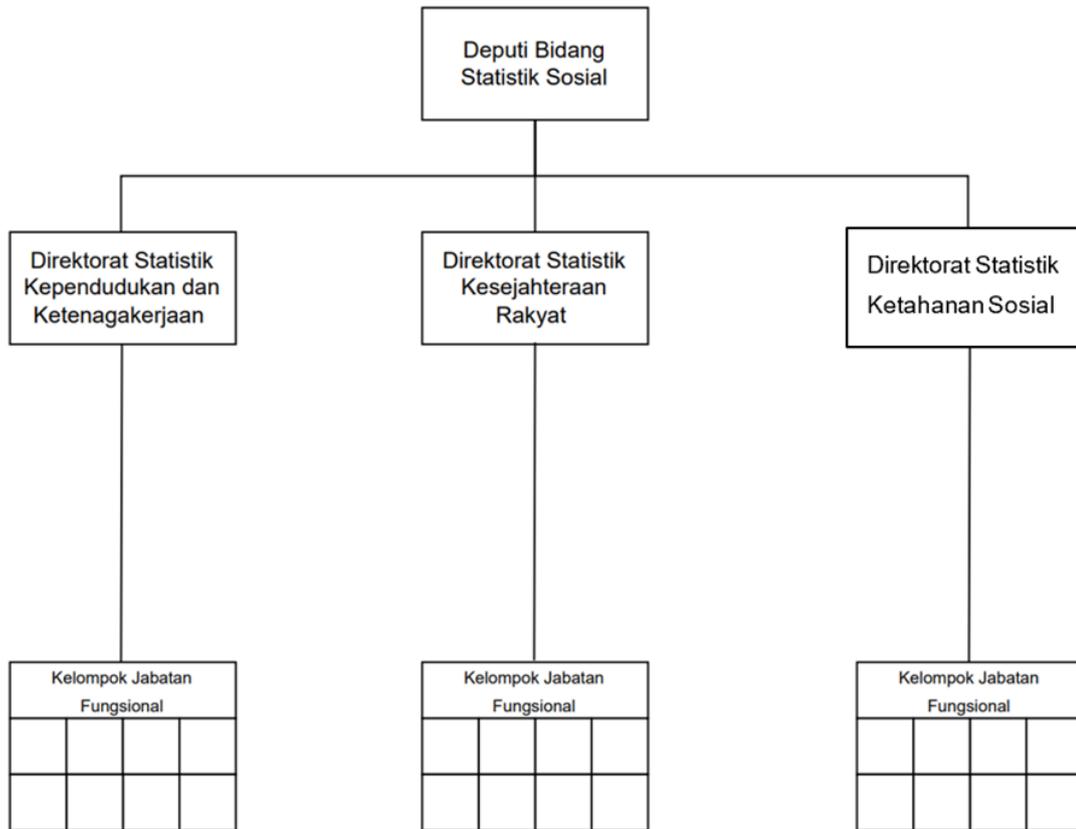


LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi Kedeputian Bidang Statistik Sosial BPS



Lampiran 2. Rencana Strategis Kedeputan Bidang Statistik Sosial BPS Tahun 2020-2024 (Reviu)

Tujuan/Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1. Menyediakan data Statistik Sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.					
S.1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik sosial yang berkualitas					
Persentase publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data	77	88	96	96	96
Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN	100	100	100	100	100
Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs	98	98	100	100	100
Tujuan 2. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
S.2.1. Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I					
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari kedeputan bidang Statistik Sosial	100	94	87	97	100
Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan		100	100	100	100

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Tahun 2022
(Reviu)

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ateng Hartono SE, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Statistik Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
NIP. 19630605 198702 1 001

Surabaya, 19 Januari 2022
Pihak Pertama

Dr. Ateng Hartono SE, M.Si
NIP. 19690109 199211 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sosial yang berkualitas	Persentase publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data (%)	Persen	96
	Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	Persen	100
	Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)	Persen	100
Tujuan 2. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di bidang statistik sosial			
Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari ke deputian bidang Statistik Sosial (%)	Persen	87
	Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Persen	100

Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Rp. 139.676.170.000,-
2. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	Rp. 4.858.473.000,-
3. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	Rp. 6.271.606.000,-
Jumlah	Rp. 150.806.249.000,-

Pihak Kedua



Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
NIP. 19630605 198702 1 001

Surabaya, 19 Januari 2022

Pihak Pertama



Dr. Ateng Hartono SE, M.Si
NIP. 19690109 199211 1 001

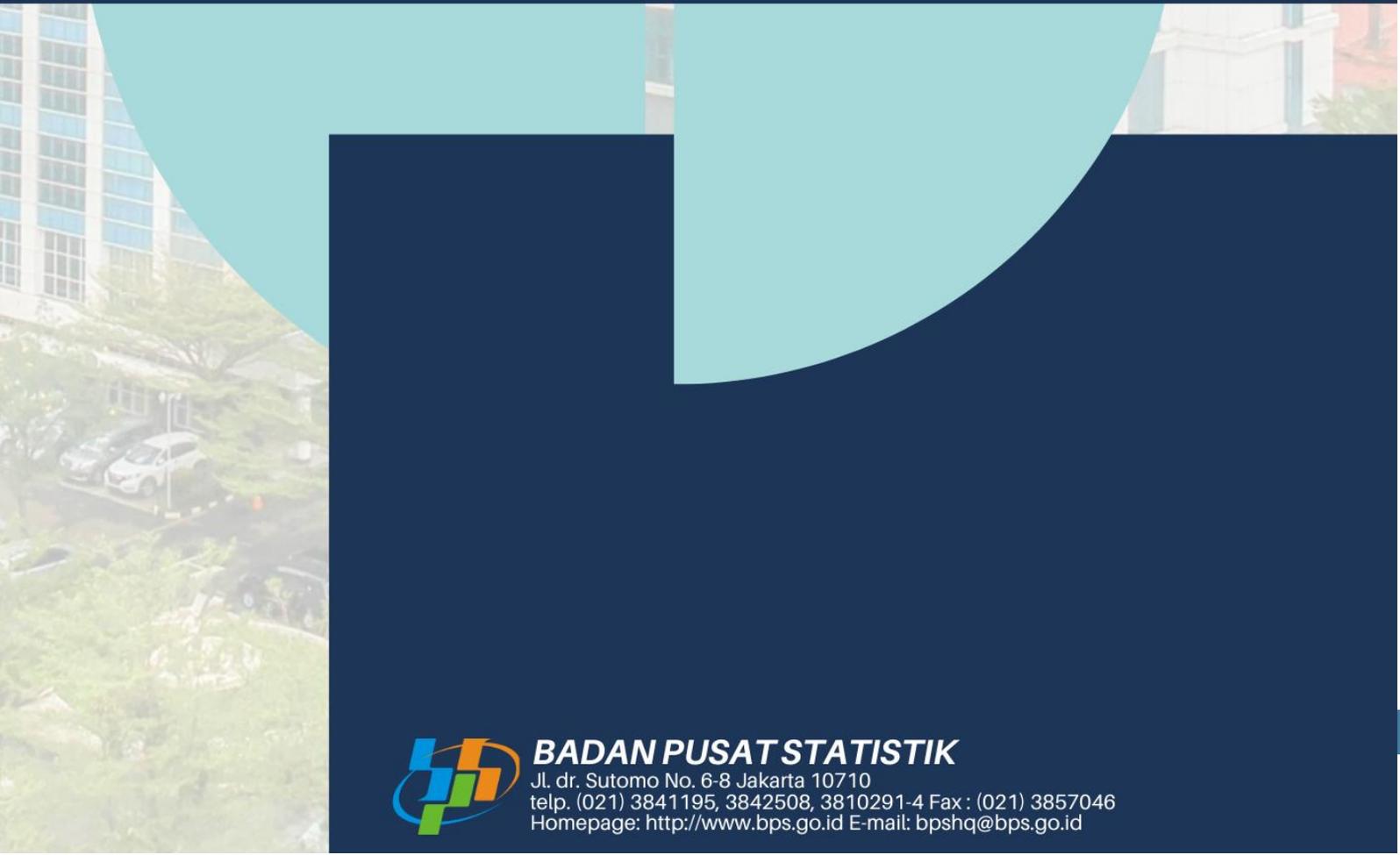
Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja Kedepuitan Bidang Statistik Sosial Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sosial yang berkualitas	Persentase publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data (%)	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
			TW II	33,33	33,33	100,00
			TW III	36,36	36,36	100,00
			TW IV	96,97	100,00	103,12
	Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	Persen	TW I	6,52	6,52	100,00
			TW II	8,70	17,39	199,89
			TW III	34,78	50,00	120,00
			TW IV	100,00	106,52	106,52
	Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)	Persen	TW I	57,69	57,69	100,00
			TW II	65,38	65,38	100,00
			TW III	76,92	76,92	100,00
			TW IV	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari kedepuitan bidang Statistik Sosial (%)	Persen	TW I	34,15	34,15	100,00
			TW II	39,02	48,78	120,00
			TW III	82,93	75,61	91,17
			TW IV	87,80	90,24	102,78
	Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Persen	TW I	38,33	38,33	100,00
			TW II	45,00	80,00	120,00
			TW III	73,33	131,67	120,00
			TW IV	100,00	173,33	120,00



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id